

## ABSTRAK

**Rabiatul Adawiyah, 1210842016, Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kota Padang, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2016. Dibimbing oleh: Kusdarini, S.IP, M.PA dan Ilham Aldelano Azre S.IP, M.A. Skripsi ini terdiri dari 224 halaman dengan referensi 16 buku teori, 4 buku metode, 1 tesis, 2 skripsi, 2 Perwako, 4 SK Walikota, 1 Peraturan Daerah, 1 Undang-Undang, 2 laporan dan 22 website internet.**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari seringnya pendidikan dijadikan sebagai janji-janji politik dalam kampanye oleh calon kepala daerah. Sebelum terpilih sebagai walikota, Mahyeldi juga menyampaikan salah satu janji politik untuk menyelenggarakan pendidikan gratis di Kota Padang. Janji politik ini direalisasikan dalam kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diatur dalam Perwako Nomor 17 Tahun 2014 dan SK Walikota Nomor 413 Tahun 2014. Perwako dan SK Walikota mengalami beberapa revisi dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Selain itu, ada banyak keluhan dari berbagai pihak terkait sarana dan prasarana di sekolah-sekolah yang belum mampu mendukung pelaksanaan pendidikan gratis.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, juga dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen pelaksanaan anggaran serta observasi untuk melihat langsung sarana dan prasarana yang ada di beberapa sekolah. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Merilee S. Grindle yang melihat implementasi dari isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BOSDA yang merupakan realisasi dari program unggulan pendidikan gratis jika ditinjau dari aspek politis sudah dapat dianggap berhasil. Hal ini dapat dilihat dari sudah tidak adanya pungutan dan telah direalisasikannya beberapa jenis manfaat yang ada dalam Perwako dan SK Walikota. Jika ditinjau dari aspek administratif kebijakan BOSDA belum dapat dianggap berhasil, karena masih ada jenis manfaat yang tidak diberikan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan serta anggaran dan prasarana yang masih banyak kekurangan. Sementara dari lingkungan implementasi, kedudukan Walikota sebagai pihak yang memiliki program unggulan berpengaruh besar baik untuk proses reformulasi maupun implementasi kebijakan BOSDA di Kota Padang. Begitu juga dengan wewenang penuh yang diberikan Walikota kepada Dinas Pendidikan untuk menentukan *input* dan *output* setiap reformulasi kebijakan memberi pengaruh terhadap proses implementasi.

**Kata Kunci: Politik, Kebijakan, Pendidikan**

## ABSTRACT

**Rabiatul Adawiyah, 1210842016, Policy Analysis of Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) in Padang City, Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Andalas University, Padang, 2016. Supervised by: Kusdarini, S.IP, M.PA and Ilham Aldelano Azre S.IP, M.A. This Undergraduate thesis consist of 224 pages which got referenced from 16 books of theory, 4 books of method, 1 thesis, 2 Undergraduate theses, 2 Major Regulation, 4 Major Decrees, 1 Local Government Regulation, 1 Lex, 2 reports, and 22 internet websites.**

This research was motivated from education often used as political appointments in the campaign of candidates for Major. Before being elected as Major, Mahyeldi ever promised that he will make free education to be implemented in Padang City. The political appointments then realized in the from of Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) policy set in Major Regulation number 17 year 2014 and Major Decree number 413 year 2014. BOSDA policy has been revised several times, from 2014 until 2016. In addition, there were many complaints from various parties regarding the facilities and infrastructure that have not been able to support the implementation of free education.

This research was done by descriptive-qualitative method. The data were collected by interview with respondents selected by using purposive sampling technique, also documentation by collecting documents of budget implementation and observation to saw directly the facilities and infrastructure that exist in some schools. The theory that was used is implementation theory of Merilee S. Grindle which examines the implementation of the content of policy and context of implementation. Then the collccted datas were analyzed using interactive analysis by Miles and Huberman.

The results showed that the policy of Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) as a realization from free education program when viewed from political aspect can be considered successful. This can be seen from the already levies paid by parents and has realized some kind of benefit in the policy. When viewed from administrative aspect the policy of Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) as a realization from free education program can't be considered succesful, there are several types of benefits that failed to give by Dinas Pendidikan, so do with implementing policy that have not been fully in accordance with the Major Regulation and Major Decree. Besides, there are still many schools that require improvement of facilities and infrastructures. While, from the context of implementation, the position of Major as the owner of the program gives big impact toward the reformulation and implementation policy. As well as the full authority that was given by the major to Dinas Pendidikan to analyse the input and the output system in each reformulation process influence the implementation process.

***Key Words: Politic, Policy, Education***